



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Transformasi Sosial dan Budaya di Indonesia

Editor:

Prof. Dr. Paulus Israwan, M.S

Dr. Masrukin, M.Si

Dr. Sofa Marwati, M.Si

Dr. M.Sultan, M.Si

Penerbit :

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA :
Kontribusi Pemikiran Ilmuwan Sosbudpol Terhadap Masa
Depan Indonesia

Topik :

- Globalisasi dan urgensi penguatan kearifan lokal
- Transformasi *public governance* di tingkat lokal untuk peningkatan mutu pelayanan publik
- Dinamika politik lokal dan prospek konsolidasi demokrasi di daerah
- Transformasi komunikasi untuk pengembangan demokrasi
- Bahasa sebagai media transformasi dalam pengembangan ipteks
- Transformasi politik luar negeri dalam era globalisasi dan demokrasi

Prosiding Seminar Nasional
31 Oktober 2012
Purwokerto

Editor :
Prof. Dr. Paulus Israwan, M.S
Dr. Masrukin, M.Si
Dr. Sofa Marwah, M.Si
Dr. M.Sultan, M.Si

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan

TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA :

Kontribusi Pemikiran Ilmuwan Sosbudpol Terhadap Masa Depan Indonesia

Buku tentang Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXVII
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

© Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Pertama Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

- Editor : Prof. Dr. Paulus Israwan, M.S
Dr. Masrukin, M.Si
Dr. Sofa Marwah, M.Si
Dr. M.Sultan, M.Si
- Perancang Sampul : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed
- Penata Letak : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed
- Pracetak dan Produksi : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Penerbit



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto

Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon 635292 (Hunting) 638337, 638795

Faksimile 631802

www.unsoed.ac.id

ISBN: 978-979-9204-77-6

xvii + 970 hal., 15,5 x 23 cm

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku
ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Sambutan Dekan	iii
Kata Pengantar Ketua Panitia	v
Daftar isi	vii

Prosiding

1. Reformasi Pelayanan Transportasi Publik dalam Cakupan Transformasi Birokrasi Indonesia <i>Amni Zarkasy dan Yusi Ika</i>	1
2. Collaborative Governance untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (Urgensi dan Tantangan Implementasinya di Indonesia) <i>Antun Mardiyanta</i>	13
3. Membangun Budaya Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah <i>Anwaruddin</i>	25
4. Mencari Bentuk Ideal Pelayanan Publik dalam Transformasi Public Governance di Tingkat Lokal <i>Ardiyan Saptawan</i>	39
5. Program Pendidikan Wajar Dikisar dan Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Tentang Kesiapan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surakarta <i>Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, Wulan Septianingrum dan Alvoian Rachmad Eko Purnomo</i>	51

6. Perencanaan Strategik Penanganan Pencemaran Sungai di Kota Cimahi <i>Ayuning Budiati</i>	65
7. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah Melalui Kegiatan Kerjasama Antar Daerah <i>Bambang Tri Harsanto</i>	77
8. Diskriminasi Urusan Pelayanan Publik di Daerah Dalam Era Good Governance <i>Budiman Widodo dan Winarti</i>	89
9. Pelayanan Publik dalam Perspektif Political Economy <i>Deddy T. Tikson</i>	99
10. Tranformasi Public Governanace dalam Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten : Melihat Perjalanan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten <i>Delly Maulana</i>	111
11. Urgensi <i>Process-Based Organizational Design</i> Bagi Kinerja Organisasi Penyelenggara Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyumas <i>Denok Kurniasih</i>	123
12. Keunikan Perilaku Pelaku PNPM-MD di Kabupaten Banyumas <i>Dwiyanto Indiahono</i>	135
13. Eksistensi Kader KB Desa dalam Meningkatkan Kesertaan Laki-Laki dalam Program KB di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga <i>Dyah R. Puspita, Rin Rostikawati dan Lilis SS</i>	145

14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Transformasi <i>Public Governance</i> di Tingkat Lokal (Konsep, Indikator-Indikator Serta Pengukurannya) <i>Hardi Warsono</i>	157
15. Peningkatan Kapasitas Birokrat dalam Pemberdayaan Masyarakat <i>Hartuti Purnawoeni</i>	173
16. <i>Governance</i> , Korupsi dan Pelayanan Publik : Refleksi <i>Governance</i> di Tingkat Lokal, dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi <i>Hikmah Nuraini</i>	185
17. Pola Transformasi Keadilan Gender dan Peran <i>Economic, Political</i> Serta <i>Civic Governance</i> Terhadap Transformasi Gender pada Satuan Pendidikan Formal di Gunungkidul <i>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni</i>	197
18. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Perspektif <i>Good Governance</i> <i>Kristina Setyowati</i>	211
19. Menuju Desa Sehat Mandiri (DSM) : Studi Efektifitas Kebijakan dalam Peningkatan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Desa di Desa Panaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga <i>Moh. Imron, Simin dan Andi Antono</i>	225
20. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi Melalui Penerapan <i>One Stop Service (OSS)</i> di BKPM Provinsi Sumatera Barat <i>Malse Yulivestra</i>	237

21. Membangun Birokrasi Pelayanan Publik di Kota Metro <i>Moh. Waspa Kusuma Budi</i>	253
22. Desentralisasi Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas <i>Muslih Faozanudin</i>	265
23. Permasalahan, Tantangan dan Arah Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pencapaian MDGs di Kabupaten Brebes <i>Pawatha Dharma dan Solahuddin Kusumanegara</i>	279
24. <i>Voices</i> dalam Pelayanan Publik : Studi Tentang Pengembangan Model Mekanisme <i>Voices</i> untuk Mewujudkan Akuntabilitas Sosial dalam Pelayanan Perijinan di Kota Surakarta <i>D. Priyo Sudibyo, Priyanto Susiloadi, dan Ismi Dwi Astuti N.</i>	293
25. “ <i>From Clients to Citizen</i> ” dan Transformasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Lokal <i>Retna Hanani</i>	305
26. Literasi Informasi Publik: Tantangan dalam Akuntabilitas Publik <i>Rutiana Dwi Wahyuningsih, Sri Hastjarjo dan Faizatul Ansoriyah</i>	317
27. Sejarah Kebijakan dan Pemikiran Reformasi Administrasi di Indonesia <i>Samodra Wibawa, Antonius Galih Prasetyo dan Luqman Atyatur Kautsar</i>	329

28. Pengembangan Investasi Kabupaten Banyumas Kajian dari Aspek Kelembagaan Pemerintah Daerah <i>Simin, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih dan Abdul Azis</i>	341
29. Analisis Penerimaan <i>E-Procurement</i> dengan Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) di Lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (I.PSE) Kementerian Keuangan Yogyakarta <i>Sadari, Sri Utami, Daris Yulianto</i>	355
✓ 30. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Kemitraan Antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta untuk Mewujudkan Kota Surakarta Sebagai Kota Layak Anak <i>Sri Yuliani, Sudaryanti, dan Muchtar Hadi</i>	365
31. Kapasitas Komunitas dalam Resolusi Konflik Berbasis <i>Community Governance</i> <i>Sudarmo dan Priyanto Susiloadi</i>	377
32. Desentralisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Praktek <i>Good Governance</i> di Indonesia <i>Titik Djumiarti</i>	391
33. Pengembangan <i>Network Governance</i> dalam Meningkatkan Daya Saing Petani Bawang Merah di Era Pasar Bebas <i>Tobirin</i>	405
34. <i>Public Private Partnership</i> Antara Pemerintah Kota Bandung dan PT. Marga Tirta Kencana dalam Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas Kota Bandung <i>Egnas Sukma F., Tomi Setiawan dan Sintaningrum</i>	419

35. Menakar Efektivitas <i>e-Procurement</i> untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> <i>Yuli Tirtariandi El Anshori</i>	431
36. <i>Cyber City & Public Service</i> :Inovasi dari Program Sumsel <i>Free Wifi Area</i> <i>Zailani Surya Marpaung</i>	443
37. Quo Vadis Pilkada dan Model Kepemimpinan Kepala Daerah <i>Adhi Iman Sulaiman</i>	457
38. Demokrasi dan Masyarakat Sipil :Urgensi ditengah Limitasi <i>Andi Ali Said Akbar</i>	469
39. Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Kemiskinan Kabupaten Brebes Tahun 2011 <i>Waluyo Handoko</i>	485
40. Proses Penjaringan Calon Partai Politik dalam Pilkada Langsung dan Prospek Konsolidasi Demokrasi di Tingkat Lokal <i>Indaru Setyo Nurprojo</i>	499
41. "Prestasi" Banten dan Pilihan Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Gubernur Banten 2011 <i>Kandung Sapto Nugroho</i>	513
42. "Bandit Politik" dalam Pemilukada: Mempengaruhi Kebijakan untuk Kepentingan Rakyat <i>Syah Firdaus</i>	525

43. Perspektif Ekofeminisme dalam Pengembangan Ekoturisme di Kawasan Wisata Baturaden Kabupaten Banyumas <i>Triana Ahdiati</i>	535
44. Kehadiran Surat Kabar Berbahasa Mandarin Sebagai Hasil Transformasi Kebijakan Politik dan Komunikasi Massa untuk Mengembangkan Demokrasi di Indonesia <i>Christine Claudia Lukman, Yasraf Amir Piliang dan Priyanto Sunarto</i>	547
45. Kampanye Politik, Kehumasan dan Pencitraan: Transformasi Kampanye Politik Menuju Indonesia yang Lebih Demokratis <i>Mite Setiansah</i>	559
46. Kebebasan Pers Dulu dan Kini: Tinjauan Filsafat Terhadap Transformasi Kebebasan Pers di Indonesia <i>Nana Sutikna</i>	571
47. Komunikasi dan Identitas Kultural: Studi Tentang Peran Komunikasi dalam Pelestarian Identitas Kultural di Kaliwungu Jawa Tengah <i>Pawito dan Drajal Tri Kartono</i>	583
48. Akuntabilitas Informasi Institusi Publik Berbasis Cyber : Studi pada Sub-Subdomain dalam Website Universitas Jenderal Soedirman <i>Wisnu Widjanarko dan Yusida Lusiana</i>	595
49. Realitas dan Prospek Diplomasi Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) <i>Agus Haryanto</i>	605

50. Tantangan Politik Luar Negeri dan Diplomasi di Era Teknologi Informasi <i>Arif Darmawan</i>	617
51. Reposisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Rangka Mencapai Kepentingan Nasional di Era Globalisasi dan Demokratisasi <i>Hartanto</i>	629
52. Kerjasama Keamanan di Kawasan Asean dan Implikasinya Bagi Stabilitas Sosial Politik Indonesia <i>Nuriyeni Kartika Bintarsari</i>	639
53. Pelaksanaan Multilateral Diplomacy Indonesia di Asia Pasific pada Era Globalisasi <i>Sri Wijayanti</i>	651
54. Tantangan Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Merespon Isu Globalisasi dan Demokrasi Menurut Perspektif Rasional <i>Tundjung Linggarwati</i>	661
55. Politik Luar Negeri Indonesia : Irisan “Tipis” dalam Politik Internasional <i>Muhammad Yamin</i>	673
56. Pengalihan Unsur Budaya dalam Penerjemahan Film <i>Asrofin Nur Kholifah</i>	687
57. Nilai-Nilai Lokal Karakter Raden Jaka Kaiman dan Implementasinya Bagi Generasi Muda di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas <i>Dyah Wijayawati</i>	699

58. Hubungan Bahasa dan Budaya dalam Pengajaran Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Asing (EFL): Perspektif Mahasiswa <i>Ririn Kurnia Trisnawati</i>	711
59. Bahasa Rupa Sebagai Pengantar Berbahasa Bagi Anak Usia Dini dalam Memotivasi Perkembangan Kreativitasnya dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi <i>Yanty Hardi Saputra, Setiawan Sabana, Priyanto Sunarto, Achmad Syarief</i>	723
60. Preferensi Pengunjung Terhadap Simulasi Kota Mini Pada Ruang Publik Pusat Belanja Sebagai Produk Budaya Populer <i>Astrid Kusumowidagdo, Agus Sachari, Pribadi Widodo dan Bambang Sugiharto</i>	733
61. Menegakkan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika : Upaya Transformasi Nilai Lokal <i>Masrukin</i>	749
62. Globalisasi dan Urgensi Penguatan Kearifan Lokal <i>Pujo Suharso</i>	763
63. Dari Sentralistik ke Otonomi (Kajian Sosiologis Tentang Bangunan Paradigma Pembangunan di Indonesia Pasca Reformasi) <i>Rahmad Santosa</i>	773
64. Kearifan Lokal Berbasis Konservasi Bagi Keseimbangan Ekologi "Sasi Lola" (<i>Trochus Niloticus</i>) di Masawoy <i>Rais Rahman Haullusy</i>	785

65. Pola Perilaku Seksual Ayla dengan Pengguna di Kota Solo <i>Rahesli Humsona, Jefta Leibo dan Siti Zunariyah</i>	797
66. Tradisi Nyumbang, Perempuan dan Solidaritas Sosial Pada Era Globalisasi dan Monetisasi Desa <i>Soelji Lestari</i>	809
67. Mahasiswa dalam Pusaran Arus Globalisasi: Demitologisasi Peran Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial <i>Sulyana Dadan</i>	827
68. Peran Pemerintah dalam Modernisasi Adat Masyarakat Baduy (Tinjauan dari Hukum Adat) <i>Suryarama</i>	837
69. Globalisasi dan Transformasi Social Perempuan Pedesaan <i>Yunindyawati</i>	851
70. Kepemimpinan dan Reengineering Birokrasi untuk Memperkuat Human Capital di Sektor Publik <i>Falih Suaedi</i>	865
71. Potensi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal <i>Rawuh Edy Priyono</i>	879
72. Globalisasi dan Urgensi Penguatan Kearifan Lokal: Teknologi Media dan Penguatan Kearifan lokal dalam keluarga <i>Ign. Suksmadi Sutoyo</i>	893

73. Transformasi <i>Public Governance</i> di Kota Palembang dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Publik <i>Hardiyansyah</i>	905
74. Pelayanan Publik Berbasis Pengguna Layanan (Kajian dari Perspektif <i>Governance</i> dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) <i>Didik G. Suharto</i>	915
75. Transformasi <i>Public Governance</i> melalui Pengembangan Partisipasi Publik di Tingkat Lokal <i>Paulus Israwan Setyoko</i>	927
76. Kerjasama Selatan-Selatan: Dinamika Kerjasama Daerah Pasca Otonomi Daerah Di Indonesia <i>Sukarso</i>	945
77. Pertukaran Sosial dalam Pesta Hajatan di Pedesaan : Peran Perempuan Dan Kearifan Lokal <i>Niken Paramarti Dasuki</i>	959

INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DAN SWASTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK

Sri Yuliani, Sudaryanti, dan Muchtar Hadi
FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Salah satu faktor pendukung kota layak anak adalah adanya keterlibatan ketiga unsur utama *governance* yakni pemerintah, masyarakat dan swasta dalam suatu jalinan kemitraan yang digerakkan oleh komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan antar aktor *governance* dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta dan hambatan apa saja yang dihadapi. Tipe penelitian adalah kualitatif deskriptif. Informan terdiri dari instansi pemerintah; lembaga bisnis; LSM, serta anak-anak yang menjadi sasaran program dan ditentukan dengan tehnik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Penelitian menemukan bahwa program KLA telah mampu mengembangkan pelayanan anak yang inovatif diantaranya melalui Kartu Insentif Anak dan pembentukan PTPAS. Meskipun demikian kedua program tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan substansial anak. Hambatan mendasar adalah belum adanya kesatuan pemahaman tentang makna Kota Layak Anak sehingga mengakibatkan lemahnya sosialisasi dan komunikasi antar aktor. Untuk keberlanjutan program disarankan agar pemerintah kota lebih memfokuskan pada pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya anak marjinal. Untuk itu perlu memberdayakan kelompok-kelompok komunitas akar rumput dan melibatkan organisasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan program.

Kata Kunci : inovasi pelayanan publik, kemitraan, kota layak anak.

A. Latar Belakang

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang dinilai sebagai pelaksana terbaik penyelenggara program dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (wartamedia.com). Program Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta) yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Program Kota Layak Anak Kota Surakarta menganggotai empat bidang program yaitu bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak, yang kesemuanya melibatkan peran serta masyarakat dan swasta. Kemitraan antar ketiga aktor dalam Governance sudah menjadi keniscayaan di era global. Membangun kota yang bisa memenuhi dan melindungi hak-hak anak tidak mungkin apabila diselenggarakan oleh instansi pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha. Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana Pemerintah kota Surakarta menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk mengembangkan pelayanan publik yang ramah anak dan hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan tersebut.

B. Telaah Literatur

Kemitraan merupakan kolaborasi di antara pemerintah, organisasi non-profit, dan bisnis dimana ada saling berbagi resiko, sumber daya, dan keahlian dalam suatu proyek yang menguntungkan bagi aktor-aktor yang terlibat maupun bagi masyarakat (Stratton dalam McQuaid, 2000). Menurut Tibbitt (2003) ciri kemitraan adalah adanya kesediaan berbagi kuasa dan sumber daya, adanya tujuan bersama dan adanya kesepakatan (*agreement*) formal secara tertulis maupun verbal.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan. Lienhard (2006) menyebut beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kemitraan yaitu : seleksi partner (tujuan dan dasar kemitraan, mekanisme insentif) ; standarisasi prosedur (transparansi, trust, reduksi risiko, pengawasan); uji kelayakan kemitraan, kelayakan ekonomi, dan penilaian resiko dilihat dari perspektif pemerintah dan kelompok mitra; perhatian yang seksama pada strukturisasi kontrak. Penelitian Bosman (2010) tentang kemitraan sekolah, lembaga komunitas dan universitas menemukan 10 (sepuluh) unsur penentu keberhasilan kemitraan yaitu (1) *communication*; (2) *shared decision making*; (3) *shared resources*; (4) *expertise and credibility*; (5) *sufficient time to develop and maintain relationships*; (6) *champions and patron spirits*; (7) *being present*; (8) *flexibility*; (9) *a shared youth development orientation*; and (10) *recognition of other partners' priorities*. Walker dan Earles (2008) yang meneliti tentang kemitraan dalam penyediaan perumahan sosial (*social housing*) menyimpulkan bahwa keberhasilan kemitraan ditentukan oleh kesediaan (*willingness*) dan komitmen aktor-aktor yang terlibat untuk berbagi kuasa (*power*) dan sumber daya, yang semua ini hanya dapat dilakukan apabila ada kepercayaan (*trust*) di antara mereka.

C. Metode

Penelitian ini merupakan riset lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer adalah aparaturnya Pemerintah Kota Surakarta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil), lembaga bisnis yang terlibat dalam kemitraan, dan organisasi masyarakat dan LSM yang tergabung dalam Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAAS), serta orang tua dan anak-anak yang menjadi kelompok sasaran program. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan pengambilan data dilakukan dengan cara

wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang memiliki tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

D. Pembahasan

Stratton (dalam McQuaid, 2000) dan Eibert (2003) merumuskan kemitraan sebagai kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-profit, dan bisnis dimana ada kesediaan saling berbagi kuasa dan sumber daya dalam suatu proyek yang menguntungkan bagi pihak yang bermitra maupun bagi masyarakat dan kerja sama itu diperkuat dengan kesepakatan (*agreement*) formal secara tertulis maupun verbal. Mengacu pada definisi ini, ada dua program dalam Kota Layak Anak di Kota Surakarta yang bisa disebut sebagai relasi kemitraan yaitu program Kartu Insentif Anak yang melibatkan kemitraan pemerintah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dengan dunia usaha dan konsorsium Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yang merupakan gabungan dari SKPD, organisasi masyarakat, dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kartu Insentif Anak adalah kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta, berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP Surakarta. Kartu Insentif Anak merupakan layanan publik yang inovatif karena baru Pemkot Surakarta yang memberikan kartu identitas bagi anak, selama ini kartu identitas penduduk hanya Kartu Tanda Penduduk bagi warga usia 17 tahun ke atas. Kartu Insentif Anak adalah kartu identitas anak dan sekaligus kartu untuk mendapatkan fasilitas diskon untuk pembelian barang dan jasa yang disediakan oleh pihak pengusaha yang terikat dalam kesepakatan kemitraan dengan Pemkot Surakarta. Sampai saat ini telah terdapat kesepakatan dengan 20 mitra usaha di bidang pendidikan, 5 mitra kesehatan, 5 mitra olahraga, 7 mitra kuliner, 6

mitra busana, dan 2 mitra wisata. Fasilitas potongan harga atau diskon yang ditawarkan mitra bisnis bervariasi mulai 5 persen hingga 50 persen.

Kesepakatan kerjasama antara Pemkot Surakarta (Dispenduk Capil) dengan mitra bisnis dilandasi oleh Perjanjian atau Kesepakatan Bersama. Ruang lingkup yang disepakati kebanyakan adalah pemberian fasilitas keringanan berupa diskon kepada anak pemegang Kartu Insentif Anak; serta jangka waktu kesepakatan adalah lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan apabila para pihak bermaksud mengubah atau mengakhiri perjanjian bersama, maka maksud tersebut harus disampaikan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Keberhasilan Pemkot Surakarta dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha maupun organisasi masyarakat tidak lepas dari faktor *trust*, *willingness* dan *power* (Walkers dan Earles, 2008). *Trust* atau kepercayaan, khususnya dunia usaha ke Pemkot Surakarta, terbangun karena aura atau citra positif Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mampu memperbaiki kondisi kota dan membangun komunikasi dan kerja sama yang selaras dan terbuka dengan pelaku bisnis, serta banyak membuat kebijakan yang mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif (sumber dari wawancara dengan beberapa mitra usaha dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapernas PP PA dan KB Surakarta Rini Kusumandari). Kesungguhan dan bukti nyata kinerja pemerintahan Jokowi mampu membangkitkan kehendak atau kesediaan (*willingness*) dunia usaha untuk berpartisipasi dalam program Kartu Insentif Anak. Dalam hal ini, kesediaan dunia usaha untuk bermitra tidak karena tekanan kekuasaan pemerintah tapi semata-mata untuk berbagi kuasa dan sumber daya (*power*) yang dimiliki atas dasar kesukarelaan atau tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Kesepakatan dalam kemitraan mestinya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kesediaan mitra usaha untuk terlibat

dalam program lebih bersifat sukarela dan berapa persen diskon yang ditawarkan juga diputuskan oleh mitra usaha. Bagi pihak Dispenduk Capil sebagai lembaga yang menginisiasi kemitraan, Kartu Insentif Anak dapat sebagai stimulan orangtua agar mau mengurus akte kelahiran anaknya dan mitra usaha meresponnya sebagai bentuk CSR yang disederhanakan pemaknaannya menjadi sekedar bentuk amal perusahaan. Tidak ada kesepakatan tertentu yang terjamin dan tidak ada kontribusi balik bagi mitra usaha. Kompensasi dari pihak Pemkot Surakarta sebatas mencantumkan nama-nama mitra usaha itu dalam backdrop, brosur, leaflet dan sosialisasi Kartu Insentif Anak. Perjanjian wapresiasi hanya menyatakan kewajiban pihak pertama (Dispenduk Capil) untuk menyediakan agregat jumlah Kartu Insentif Anak yang telah diterbitkan kepada stakeholders 6 (enam) bulan sekali dan pihak kedua (mitra bisnis) dinyatakan wapresiasi apabila tidak menyediakan fasilitas yang disepakati. Tidak adanya kontrak kesepakatan yang jelas menyebabkan mitra usaha merasa tidak berkewajiban untuk mencatat atau memonitor pemanfaatan Kartu Insentif Anak. Sejalan ini, pihak Dispenduk Capil juga belum membuat laporan atau pun evaluasi terhadap kemitraan yang terjalin.

Meskipun program Kartu Insentif Anak ini merupakan program yang bermanfaat bagi anak namun nampaknya belum semua anak di Kota Surakarta memiliki Kartu Insentif Anak. "Harus diakui saat ini warga yang memiliki KIA jumlahnya memang masih sedikit. Baru sekitar 20.000 kartu yang kami terbitkan. Padahal kalau dilihat dari sasaramnya yakni anak berusia 0-18 tahun jumlahnya mencapai 125.000-an anak atau sekitar 25% dari total jumlah penduduk Solo," jelas Satri Romadhon (<http://www.solopos.com/2011/solo/135-000-anak-tak-punya-kia-101744>).

Banyak orang tua dan anak yang sama sekali tidak tahu tentang program Kota Layak Anak dan Kartu Insentif Anak, yang mereka ketahui sebatas bagian-bagian dari program Kota Layak

Anak seperti Taman Cerdas, Wajib Belajar, dan perpustakaan keliling. Mengenai minimnya pemahaman masyarakat tentang Kartu Insentif Anak, pihak mitra bisnis maupun Dispenduk Capil sama-sama menaruh sosialisasi yang kurang efektif sebagai faktor penyebabnya. Informasi tentang Kartu Insentif Anak memang belum menjangkau lokasi-lokasi strategis dan kurang memanfaatkan lembaga sipil di tingkat bawah seperti PKK, RT, RW, sekolah atau tempat kursus. Mitra usaha sendiri juga tidak mempunyai inisiatif untuk menginformasikan tentang adanya Kartu Insentif Anak.

Faktor keterbatasan sumber daya manusia di Bapermas PP PA dan KB juga menjadi faktor penghambat. Rita Margaretha - dari Bagian Pengolah Data dan Statistik Dispenduk Capil Kota Surakarta - menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada uraian tugas, pokok dan fungsi terkait pelaksanaan Kartu Insentif Anak. Implementasi Kartu Insentif Anak selama ini dibebankan ke bagian Pengolah Data dan Statistik Dispenduk Capil, padahal beban kerja bagian ini sudah cukup banyak. Akibatnya implementasi program Kartu Insentif Anak mulai dari sosialisasi, pelayanan pembuatan Kartu Insentif Anak dan monitoring menjadi kurang optimal.

Selain merangkul mitra usaha, pengembangan Kota Layak Anak juga melibatkan organisasi masyarakat dan LSM yang bergabung dalam konsorsium Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTPAS). PTPAS merupakan kerjasama lintas sektor yang mengemban tugas antara lain: merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan, program, kegiatan; melakukan upaya fasilitasi dan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat atau penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Adapun sumber pendanaan PTPAS diambilkan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Surakarta, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

(Keputusan Walikota Surakarta Nomor 462.05/84-A/I/2010 tentang PTPAS).

PTPAS menjadi forum bersama dimana organisasi lintas sektor saling berbagi sumber daya dan keahlian untuk bersinergi mengatasi problem kekerasan dan eksploitasi anak. Instansi negara tidak dapat menggunakan pendekatan legal, formal, dan hirarkis prosedural untuk memecahkan masalah perlindungan anak yang sangat kompleks. Masalah kekerasan terhadap anak, Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), anak bermasalah dengan hukum, anak jalanan, dan lain-lain lebih memerlukan pendampingan dan advokasi bukan pemecahan secara *coercive* atau penegakan hukum dan bukan pula penanganan administratif yang hirarkis prosedural. Dalam hal ini, LSM lebih menguasai baik data dan permasalahan di lapangan maupun metode penanganannya. Kelemahan LSM adalah mereka tidak punya *coercive power* - kapasitas perumusan regulasi dan penegakan hukum. Melalui PTPAS, institusi pemerintah bersama dengan LSM dan organisasi masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak dapat bersinergi, berbagi power, kapasitas dan sumber daya guna memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

PTPAS merupakan solusi bagi problem lenyapnya komunikasi dan koordinasi, baik antar institusi negara (SK/PTD yang membidangi ranah perlindungan anak (Bapermas PP PA & KB, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, dsb), Polresta, Kejaksaan dan Pengadilan, maupun antar institusi negara dengan non negara seperti LSM SPEK-HAM, Yayasan KAKAK, Seroja, Palayat HIL, PKK, dan sebagainya. Struktur PTPAS bersifat *flexibel non birokratis*, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan tanpa dihalangi oleh sekat-sekat birokrasi yang legal formal dan prosedural.

Hambatan atau kendala yang membuat PTPAS belum bisa berfungsi optimal adalah masalah koordinasi dan komunikasi antar stakeholders khususnya dengan instansi pemerintah dan adanya perbedaan persepsi tentang penaknaan program KLA

Menurut aktivis LSM, program KLA belum menyentuh hak-hak anak. Institusi pemerintah masih terkesan sekedar mengimplementasikan kebijakan pusat dan belum menyentuh persoalan perlindungan anak yang substansial. Banyak program dan kegiatan yang bersifat retorik dan fisik. Problem anak sangat kompleks tidak sekedar mengeluarkan Kartu Insentif Anak, membangun Taman Cerdas atau program Wajib Belajar, seharusnya Kota Layak Anak dimaknai sebagai kota yang memenuhi hak-hak anak seperti hak untuk hidup, hak berkembang, dan hak mendapatkan pendidikan. Sebagai contoh masih banyak anak di Kota Surakarta yang putus sekolah atau menjadi anak jalanan, pengamen, pengemis dan pengasong. Kemudian untuk masyarakat sendiri sejauh ini belum dilibatkan dalam keseluruhan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak, mereka hanya sekedar ikut dalam kegiatan tanpa tahu apa filosofi atau makna Kota Layak Anak.

E. Kesimpulan dan Saran

Melalui kemitraan dengan masyarakat dan swasta, Pemerintah Kota Surakarta mampu mengembangkan pelayanan bagi anak yang inovatif diantaranya penerbitan Kartu Insentif Anak dan pembentukan konsorsium PTPAS untuk melindungi hak-hak anak. Program Kartu Insentif Anak dan PTPAS dinilai cukup inovatif dan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya anak, meskipun begitu masyarakat banyak yang tidak tahu tentang kedua program pelayanan ini. Hal ini terjadi karena belum ada kesatuan pemahaman tentang makna Kota Layak Anak sehingga mengakibatkan lemahnya sosialisasi dan komunikasi antar aktor. Untuk itu penelitian ini mengemukakan saran untuk penyebaran informasi tentang Kartu Insentif Anak dan PTPAS sebaiknya sosialisasi dilakukan lewat jalur organisasi masyarakat di tingkat grass root seperti PKK, RT/RW maupun lewat sekolah dan kursus-kursus. Dan untuk keberhasilan program hendaknya lebih banyak memberdayakan kelompok-kelompok komunitas akar rumput mulai dari

perencanaan sampai pemeliharaan. Bagi pemerintah kota hendaknya ke depannya lebih memfokuskan pada pengembangan program yang secara substansial mampu memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak anak, khususnya hak anak marjinal, bukan lagi program-program yang bersifat kosmetik. Untuk itu sebaiknya pemerintah melibatkan LSM dan organisasi masyarakat di keseluruhan tahapan program.

Daftar Pustaka

- Walker, Belinda Antonia, and Earles, Wendy (2008) *Public private partnerships for increasing social housing: a meta-synthesis of qualitative studies to inform non-profit practice in a regional area*. Proceedings of the ISTR Eighth International Conference 2008 In: ISTR Eighth International Conference, 9-12 July 2008, Barcelona, Spain.
- Keputusan Walikota Surakarta No. 462.05/84-A/1/20120 tentang PTPAS
- Peraturan Walikota Surakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Kartu Insentif Anak
- 135.000 Anak tak punya KIA (<http://www.solopos.com/2011/solo/135-000-anak-tak-punya-kia-101744>). Diunduh 28 Januari 2012
- Program 100 kota layak anak : Surakarta paling layak. <http://wartapedia.com/sosial/pks/1477-program-100-kota-anak-surakarta-paling-layak.html>. Diunduh 28 Januari 2012
- Hosma, Linda M. et al. 2010. *Elements for Successful Collaboration Between K-8 School, Community Agency, and University Partners: The Lead Peace Partnership*. Journal of School Health. Vol. 80, Issue 10. Pp 501-507
- Hilbert, KW. 2003. *Theory and Practice of Partnership*. <http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/123/02chapter2.pdf?sequence=6>. Unduh 30 Mei 2012.
- Lienhard, Andreas. 2006. *Public Private Partnerships (PPPs) in Switzerland: experiences – risks – potentials*. International Review of Administrative Sciences. IIAS, SAIR Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi) Vol 72(4):547–563
- McQuaid, R.W. (2000) "The Theory of Partnerships - Why have Partnerships", dalam S.P. Osborne (ed.), *Managing public-private partnerships for public services: an international perspective* (Routledge, London) pp. 9-35.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta. 1992.
- Sri Yuliani, Sudaryanti, dan Muchtar Hadi. 2012. *Pengembangan Kebijakan Pemerintah, Masyarakat dan Siswa Berbasis Human Governance untuk Mengajukan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak*. Draft Laporan Penelitian Hibah Bersaing